

Sembilan Tahun Lalu

EUFORIA REFORMASI yang dimulai pada 1998 akhirnya menyentuh pula dunia pendidikan Islam. Empat tahun setelah pemerintahan Orde Baru lengser, sejarah baru arah pendidikan Islam dimulai. Momen politik pasca Soeharto menjadi awal transformasi perguruan tinggi Islam negeri di lingkungan Departemen Agama—kini Kementerian Agama. Transisi demokrasi mengubah wajah IAIN menjadi UIN.

Tekad sudah bulat. Tepat 20 Mei 2002, perubahan IAIN menjadi UIN resmi ditetapkan. Saat itu, roda rezim dikendalikan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan pada saat memerintah ia merangkap sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)—yang sering dikategorikan sebagai partai kalangan nasionalis.

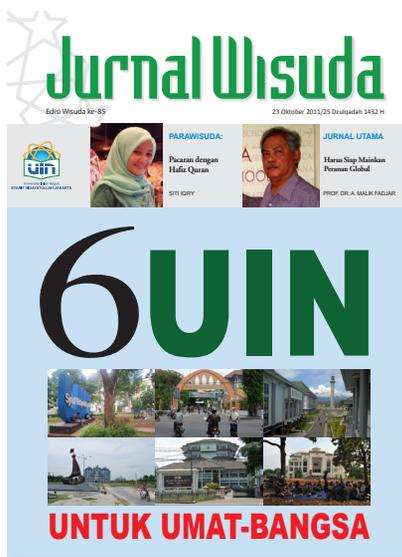
Seakan tidak bisa dibendung, angin perubahan dari UIN Jakarta itu berhembus kencang menuju segala penjuru wilayah di Indonesia. Dua tahun kemudian (21 Juni 2004), IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Jawa Timur) dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengikuti jejak UIN Jakarta.

Setahun setelahnya (10 Oktober 2005), langkah ketiga IAIN itu dijejaki IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (Jawa Barat), IAIN Alauddin Makassar (Sulawesi Selatan), dan IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (Riau). Perubahan status itu ditetapkan Presiden Dr Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu merangkap sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat—partainya orang-orang nasionalis-religius.

Tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat dan cepat bagi umat Islam Indonesia untuk memiliki enam Universitas Islam Negeri (UIN). Namun, angka itu belum juga beranjak naik dalam enam tahun belakangan ini. Tak jelas, apakah karena belum dicabutnya pernyataan larangan pemerintah yang disampaikan Muhammad M Basyuni, pada saat menjabat Menteri Agama, atau karena memang belum ada pengajuan permohonan perubahan status dari IAIN/STAIN lainnya.

Transformasi status itu sebenarnya merupakan langkah mula perjuangan menghilangkan dikhotomi keilmuan yang “menjajah” dunia pendidikan Indonesia. Ketika berubah menjadi UIN, dikhotomi antara ilmu agama dan ilmu umum seharusnya secara otomatis sudah lenyap.

Tak heran bila kemudian nomenklatur fakultas ikut berubah pula. Fakultas Tarbiyah di UIN Jakarta, misalnya, berubah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM), dan seterusnya.



Perubahan nomenklatur fakultas semacam ini masih terkesan sebagai “penyandingan” semata—meminjam istilah Prof Dr M Quraish Shihab.

Usaha menghilangkan dikhotomi keilmuan di lingkungan UIN-UIN memang tak akan berhenti. Di UIN Jakarta, usaha itu disebut “Reintegrasi”, di UIN Yogya disebut “Integrasi-Interkoneksi”, di UIN Pekanbaru disebut “Ilmu Islami”, dan lainnya. Gambar dari usaha itu pun berbedabeda. Misalnya, ilmu digambarkan sebagai pohon (UIN Malang), sarang laba-laba (UIN Yogya), dan spiral-andromeda (UIN Pekanbaru).

Apa pun gambar dan sebutan namanya, UIN-UIN itu telah mencoba mengembalikan “kejayaan” Islam yang pernah diraih

beberapa abad silam. Intinya, semua ilmu pengetahuan bersumber kepada Sang Pencipta.

Selain mempertahankan fakultas-fakultas “bawaan” IAIN, yang menjadi kekhawatiran sebagian kalangan pendidik, transformasi status semakin menambah jumlah fakultas baru. Antara lain, Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Enam UIN tampak bersepakat mendirikan fakultas ini. Juga, Fakultas Psikologi dan Fakultas Ekonomi—walau dengan nomenklatur berbeda.

Ada pula fakultas baru yang tidak dimiliki masing-masing UIN. Misalnya, Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UIN Jakarta), Fakultas Humaniora dan Budaya (UIN Malang), Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (UIN Yogya), Fakultas Ilmu Kesehatan (UIN Makassar), dan Fakultas Pertanian dan Peternakan (UIN Pekanbaru).

Bisa jadi, ini karena UIN-UIN prihatin terhadap keteringgalan umat (Islam) dalam beberapa bidang ilmu. Diharapkan, dengan fakultas-fakultas baru itu, santri-santri pesantren khususnya mampu mengejar ketertinggalan dan dapat berkiprah dalam persoalan global.

Perubahan juga terjadi pada gedung-gedung yang selama ini terkesan kumuh, kotor, dan bagaikan kuburan. Pembangunan sarana dan prasarana UIN-UIN itu mendapat dukungan dari dana Islamic Development Bank, beberapa negara dan pemerintah. Intinya, gedung-gedung UIN kini semakin mentereng, mewah, dan megah.

Ke depan, apa yang akan dilakukan UIN-UIN ketika dihadapkan kepada RUU Pendidikan Tinggi yang kini diperbincangkan di lembaga legislatif? Lalu, kemanakah UIN-UIN akan berinduk? Ke Kemenag atau Kemendiknas? Tetap ber”ikhlas beramal” atau ber”Tut Wuri Handayani”?

Akhirulkalam, keenam UIN, yang kini memasuki tahun kesembilan, adalah tumpuan umat-bangsa agar menjadi pusat peradaban. Sukses selalu. Salam. □ IDRIS THAHA